PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Survey Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang)

Fitri Yani Sari Manurung
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia
Jl. Dipatiukur No. 112-116 Bandung 40132
e-mail : akkuh_fithrie@yahoo.com

ABSTRACT

The application of modern tax administration system is intended to encourage taxpayer compliance, therefore an increase in the public service to be one of the important points of the overall tax administration reform in the DJP, besides public awareness of tax obligations to comply with applicable plays an important role in improving tax compliance. The purpose of this study was to examine the effect of the application of modern tax administration system and taxpayer awareness on tax compliance.

The method used in this research is descriptive research methods and verification. The population in this study is an individual taxpayer on KPP Soreang and samples taken as many as 100 individual taxpayers using purposive sampling technique sampling. The analysis used is a Structural Equation Model (Structural Equation Models - SEM) approach Partial Least Square (PLS).

The results of the analysis explained that the application of modern tax administration system influencing taxpayer compliance and taxpayer awareness influencing taxpayer compliance. Furthermore, the application of modern tax administration system has a moderate correlation value interpretation and awareness taxpayer has a low correlation value interpretation

Keyword : *Modern Tax Administration System, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan pajak merupakan sumber utama yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Besar dan kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin. Proses pengenaan dan pemungutan pajak ini memerlukan adanya administrasi perpajakan, untuk administrasi pajak pusat diemban oleh instansi pemerintah yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah Departemen Keuangan. Memiliki visi menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. (Rapina, 2011)

Tuntutan akan peningkatan penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. (Sinta Setiana, 2010)

Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masih dibawah 20% setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat melalui APBN. Tetapi dengan adanya modernisasi perpajakan, penerimaan negara meningkat secara signifikan dari 20% menjadi 75% setiap tahunnya walaupun hal tersebut masih jauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN. (Liberti Pandiangan, 2007:18) Untuk mencapai tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak yang tinggi, tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparatur perpajakan yang tinggi, pada tahun 2002 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan reformasi pada sistem administrasi perpajakan yang disebut dengan Modernisasi. Modernisasi pajak dilakukan dengan mengutamakan pemberian pelayanan prima kepada wajib pajak yang diimbangi dengan pengawasan intensif, sekaligus menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance)* diseluruh unit kerja dilingkungan DJP. (Siti Kurnia Rahayu, 2009:118)

Saat ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat baru sekira 520 Wajib Pajak (WP) Badan yang membayar pajak dari sekira lima juta badan usaha yang memiliki laba. Penyebab utama ketidakpatuhannya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dikarenakan banyaknya wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan. (Chandra Budi: 2013)

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, lemahnya sistem administrasi perpajakan ikut menyebabkan tingginya piutang pajak yang tidak tertagih oleh negara. Ada perusahaan yang mempailitkan perusahaannya untuk menghindari utang pajak yang sudah tertumpuk tinggi. Selain perusahaan, wajib pajak orang pribadi juga, sangat banyak menghindar untuk membayar pajak.(Fuad Rahmany: 2013)

Pajak yang dibayarkan masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Namun demikian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan hal yang tidak mudah, pajak masih dirasakan sebagai beban oleh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Namun demikian, pemerintah harus tetap memotivasi para wajib pajak untuk dapat menjadikan pajak sebagai suatu kesadaran.(Mulyari dan Eri Final, 2009)

Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pajak mengatakan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah. Hal itu terlihat dari masih minimnya jumlah wajib pajak, baik pribadi maupun perusahaan yang membayar pajak. Seharusnya ada enam juta perusahaan yang membayar pajak namun saat ini baru 520 ribu yang membayar pajak. Sementara jumlah wajib pajak pribadi baru 30 persen yang membayar pajak. Menurut Direktur DJP tersebut pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh kebutuhan pembangunan negara, baik pembangunan infrastruktur, belanja subsidi dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak. (Fuad Rahmany, 2013)

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan Wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *Self Assessment System* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. (Tryana A.M. Tiraada, 2013) Kepatuhan wajib pajak bisa pula dilihat dari banyaknya wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Kesadaran masyarakat baru nampak di hari-hari terakhir batas waktu penyerahan SPT, hal itu tetap menunjukkan adanya kemajuan tingkat kepatuhan dari wajib pajak, terlihat masyarakat berduyun-duyun untuk menunaikan kewajibannya membayar pajak. (Agus Susanto, 2009)

Banyak permasalahan yang mendasar di masyarakat yang menjadi suatu alasan mengapa masyarakat menolak membayar pajak, misalnya peraturan pelaksanaan yang dibuat sendiri oleh Dirjen Pajak, cenderung memihak pada kemudahan fiskus dalam memenuhi tugasnya. Selain peraturan yang tidak berpihak pada masyarakat, bahwa *self assessment system* yang merupakan sistem pemungutan pajak sejak era reformasi, yang berprinsip bahwa wajib pajak menghitung sendiri besaran pajaknya, dianggap masih jauh dari harapan. (Anshari Ritonga, 2010)

Kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan terbilang rendah. Tentunya untuk mencapai target pajak yang telah diamanatkan tersebut, sangat dibutuhkan peran serta aktif seluruh masyarakat dan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Soreang)."

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.
2. Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah dan rumusan masalah, maka maksud penelitian ini adalah untuk mendapatkan kebenaran bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan mengumpulkan data yang akurat dan relevan melalui uji empiris.

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis besarnya pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan

modern terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

2. Untuk menganalisis besarnya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu akuntansi dan memecahkan masalah yang terdapat pada kajian penelitian yaitu mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sistem administrasi perpajakan modern menurut Suparman (2007:1) adalah :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat"

Indikator modernisasi administrasi perpajakan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:110) adalah :

1. Retruktur organisasi
2. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi
3. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
4. Pelaksanaan *good governance*

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menurut Manik Asri (2009) adalah :

> "Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta meliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya."

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Manik Asri (2009:5) adalah :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Safri Numatu dan dikutip oleh Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2010:110) adalah :

> "Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

Indikator kesadaran wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dan Handayani (2009) adalah :

1. Mengisi Formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
2. Menghitung perhitungan dengan benar.
3. Membayar pajak tepat waktu.
4. Tepat waktu dalam melaporkan SPT.
5. Tidak mempunyai tunggakan.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program reformasi administrasi perpajakan telah mendapat peran cukup penting dalam menentukan masa depan Direktorat Jenderal Pajak. Tepatnya sejak program tersebut digulirkan pertama kali pada 2002. Untuk itu dalam praktiknya, Ditjen Pajak melakukan berbagai pembenahan. Di antaranya pembenahan organisasi yang kini lebih menyesuaikan pada kebutuhan wajib pajak. Ditjen Pajak juga melakukan pembaharuan di bidang informasi teknologi, *business redesign process* serta sumber daya manusia (SDM).

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:140) mengatakan bahwa :

> "Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak dan tarif pajak."

Menurut Djazoeli Sadhani (2005:60) mengatakan bahwa :

> "Sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif, meliputi aspek teknologi informasi yaitu perangkat lunak, perangkat keras, dan sumber daya manusia dengan tujuan mencapai tingkat kepatuhan wajib pajak dan tercapainya produktivitas kinerja aparat perpajakan yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)."

Menurut Chaizi Nasucha (2004:47) mengatakan bahwa :

> "Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai

tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang administrasi pajak yang dilakukan secara komprehensif untuk mencapai tingkat kepatuhan kepatuhan yang tinggi dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rapina, Jerry, Yenni Carolina (2011) bahwa besarnya kontribusi atau pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang terdiri dari sub variabel struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi dan budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinta Setiana, Tan Kwang En, Lidya Agustina (2010) bahwa wajib pajak memiliki tanggapan yang cukup baik terhadap penerapan sistem administrasi perpajakan modern. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern mempunyai pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan Kanwil DJP wajib pajak.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dengan *self assessment system* diharapkan wajib pajak akan melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Maka diharapkan wajib pajak akan menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tetapi kepatuhan itu sendiri pun perlu didorong dengan adanya kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin besar kesadaran wajib pajak akan fungsi negara maka semakin besar tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.Begitu pula dengan diterapkannya sanksi perpajakan pada setiap pelanggaran yang terjadi akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Menurut Oliver Oldman (2006:119) mengatakan bahwa:

> "Melalaikan pemenuhan kewajiban perpajakan disebabkan oleh ketidakpatuhan (ignorance), yaitu wajib pajak tidak sadar akan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersebut."

Menurut Liana Ekawati (2009:78) mengatakan bahwa :

> "Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan dan sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin tinggi."

Menurut Suyatmin (2004:34) mengatakan bahwa:

> "Kesadaran wajib pajak dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak."

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan sukarela untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan yang semakin tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M Tiraada (2013) bahwa kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Masyarakat yang berada di Kabupaten Minahasa Selatan tidak terlalu memandang penting Kepatuhan Wajib Pajak dikarenakan Kesadaran Perpajakan hanya akan menjadi bahan pertimbangan bagi mereka untuk menyetorkan nominal pajak yang dibebankan kepada wajib pajak tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ketut Evi Susilawati dan Ketut Budiartha (2013) bahwa koefisien regresi dukungan kesadaran wajib pajak senilai 0,211 dengan signifikansi sebesar 0,000, yang berada di bawah *level of significant* 0,05, hal ini berarti hipotesis 1 diterima, maka kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

2.3 Hipotesis

H_1 : Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

III. OBJEK METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian digunakan untuk mendapatkan data sesuai tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, valid dan *realible*. Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

3.2 Metode Penelitian

Metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sedangkan metode penelitian verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran teori dan hipotesis yang telah dikemukakan para ahli mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan

Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Metode verifikatif digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan alat uji statistik yaitu Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model – SEM) berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan *Partial Least Square* (PLS). Pertimbangan menggunakan model ini, karena kemampuannya untuk mengukur konstruk melalui indikator-indikatornya serta menganalisis variabel indikator, variabel laten, dan kekeliruan pengukurannya.

3.2.1 Desain Penelitian

Desain penelitian menurut Sugiyono (2010) adalah sebagai berikut:

> "Desain penelitian adalah keseluruhan dari perencanaan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengantisipasi beberapa kesulitan yang mungkin timbul selama proses penelitian, hal ini penting karena desain penelitian merupakan strategi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan untuk keperluan pengujian hipotesis atau untuk menjawab pertanyaan penelitian dan sebagai alat untuk mengontrol variabel yang berpengaruh dalam penelitian."

Unit analisis/elemen yang digunakan adalah individu, dalam hal ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Soreang. *Time horizon* yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross sectional*. Menurut Uma Sekaran (2006:177) studi *one shoot* atau *cross sectional* didefinisikan sebagai berikut:

> "Studi *one shot* atau *cross sectional* adalah sebuah studi yang dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan, mungkin selama periode harian, mingguan, atau bulanan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian".

3.2.2 Operasionalisasi Penelitian

Operasionalisasi variabel menurut Umi Narimawati (2010:31) sebagai berikut :

> "Operasionalisasi Variabel adalah proses penguraian variabel penelitian kedalam sub variabel, dimensi, indikator sub variabel, dan pengukuran. Adapun syarat penguraian operasionalisasi dilakukan bila dasar konsep dan indikator masing-masing variabel sudah jelas, apabila belum jelas secara konseptual maka perlu dilakukan analisis faktor".

Berdasarkan judul usulan penelitian yang telah dikemukakan diatas yaitu "Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak". Maka variabel-variabel yang diteliti dapat dibedakan menjadi dua:

1. Variabel bebas (*independent variable*)
   Pengertian variabel bebas menurut Sugiyono (2008:39) adalah sebagai berikut :
   > "Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependent* (terikat)".

   Dalam hal ini yang merupakan variabel bebas pertama adalah Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1) dan Kesadaran wajib pajak (X_2) sebagai variabel bebas kedua.
   a. Sistem administrasi perpajakan modern adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Variabel sistem administrasi perpajakan modern diukur dengan indikator restruktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen sumber daya manusia dan pelaksanaan *good governance*.
   b. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta meliki kesungguhan dan keinginan untuk memahami kewajiban pajaknya. Variabel kesadaran wajib pajak diukur dengan indikator mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Variabel terikat (*dependent variable*)
   Pengertian variabel terikat menurut Sugiyono (2008:40) adalah sebagai berikut :
   > "Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas."

   Dalam hal ini variabel yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti adalah Kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak taat dan patuh dalam melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan dengan aturan perpajakan yang berlaku.Variabel kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung perhitungan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, tepat waktu dalam melaporkan SPT dan tidak mempunyai tunggakan.

3.3 Populasi dan Penarikan Sampel

1. Populasi

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa populasi merupakan obyek atau subjek yang

berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Soreang pada tahun 2013 sebanyak 11.463 orang.

2. Sampel

Metode yang digunakan untuk menentukan sampel oleh peneliti adalah pendekatan *Slovin.*

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Umi Narimawati (2010:38)

Keterangan :
n = jumlah sampel
N = jumlah populasi
E =batas kesalahan yang ditoleransi (1%, 5%, 10%)

Berdasarkan rumus diatas, maka dapat diketahui sample yang akan diambil dalam penelitian ini melalui perhitungan berikut ini :

$$n = \frac{11.463}{(1 + 11.463 \times 0{,}10^2)}$$
$$n = 99{,}1351 \,/100$$

Berdasarkan penjelasan diatas, maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Soreang sebanyak 100 wajib pajak. Diambil tingkat kepercayaan 10% karena hasil dari jumlah tersebut sudah dapat mewakili wajib pajak yang ada di KPP Pratama Soreang, karena datanya pun diambil secara *random*. Selain itu apabila mengambil tingkat kepercayaan 1% dan 5% akan memakan waktu dan biaya yang lebih lama dan banyak.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*field Research*)
   a. Metode pengamatan (Observasi) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, diamati atau kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti mengadakan pengamatan langsung pada wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Soreang.
   b. Wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait langsung dan berkompeten dengan permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini peneliti melakukan tanya jawab dengan wajib pajak orang pribadi yang berada di KPP Pratama Soreang dan melakukan melakukan tanya jawab dengan pegawai bagian umum mengenai fenomena khusus yang diperoleh berdasarkan KPP.
   c. Kuesioner, teknik kuesioner yang peneliti gunakan adalah kuesioner tertutup, suatu cara pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden dan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Soreang, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan yang ada pada kuesioner.
   d. Dokumentasi
      Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang terdapat pada perusahaan. Mulai dari literatur, buku-buku yang ada. Adapun dokumen-dokumen yang menggambarkan sejarah KPP Pratama Soreang, dokumen yang menerangkan struktur organisasi pada KPP Pratama Soreang.
2. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis. Data yang diperoleh merupakan data sekunder yang dapat mendukung penelitian ini, yaitu dengan membaca dan mempelajari buku-buku wajib (litelatur) yang berkaitang dengan variabel yang diteliti yaitu sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak, ataupun sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Sebelum kuisioner digunakan untuk pengumpulan data yang sebenarnya, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi penelitian. Uji coba dilkukan untuk mengetahui tingkat kesahihan (validitas) dan kekonsistenan (reliabilitas) alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk digunakan sebagai alat ukut untuk pengumpulan dan penelitian.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Metode Analisis

Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh sendiri maupun oleh orang lain. Peneliti melakukan analisa

terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif dan verifikatif.

Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis *variance* atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square* (PLS) menggunakan software *SmartPLS 2.0*.

Menurut Imam Ghozali (2006:1) metode *Partial Least Square* (PLS) dijelaskan sebagai berikut:

> "Model persamaan strukturan berbasis *variance* (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (*variable manifest*)".

Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

Langkah-langkah dalam metode *Partial Least Square* yang dilakukan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Merancang Model Pengukuran

Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel *manifest*. Untuk variabel laten manajemen laba terdiri dari 3 variabel *manifest*. Kemudian untuk variabel laten sanksi perpajakan terdiri dari 4 variabel *manifest* dan untuk variabel laten kepatuhan perpajakan terdiri dari 5 variabel *manifest*.

2. Merancang Model Struktural

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari satu variabel laten eksogen (Manajemen laba dan Sanksi perpajakan) dan satu variabel laten endogen (Kepatuhan perpajakan). *Inner model* yang kadang disebut juga dengan *inner relation structural model dan substantive theory*, yaitu untuk menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*, dengan model persamaannya dapat ditulis seperti di bawah ini:

$$\eta i = \Sigma i \beta j_i \xi i + \Sigma b \gamma j_{.b} \xi b + \zeta j$$

Imam Ghozali (2006:22)

Dimana β_{ji} dan γ_{jb} adalah koefisien jalur yang menghubungkan prediktor endogen dan variabel laten eksogen ξ dan η sepanjang *range* indeks i dan b dan ζ_j adalah *inner residual* variabel.

3. Mengkonstruksi Diagram Jalur

Hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khusus dapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antar konstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagram alur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukan hubungan kausal langsung dari suatu konstruk ke konstruk lainya. Konstruk eksogen dikenal dengan *independent variable* yang diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk ekosgen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

Secara lengkap model srtuktural pada penelitian ini dapat digambarkan pada gambar 3.1.

Untuk memahami Gambar tersebut, pada tabel 3.1 akan dijelaskan mengenai lambang-lambang statistik yang digunakan dalam model struktural.

4. Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis

Berdasarkan konsep model penelitian pada tahap dua diatas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis. Persamaan yang dibangun dari diagram alur yang konversi terdiri atas:

a. Persamaan *inner model*, menyatakan hubungan kausalitas untuk menguji hipotesis.
b. Persamaan *outer model* (model pengukuran), menyatakan hubungan kausalitas antara indikator dengan variabel penelitia (*latent*).

Formulasi bentuk persamaan struktural sebagai berikut:

PP $\eta = \lambda_1 \xi + \zeta$

Persamaan pengukuran variabel laten pada penelitian ini dijabarkan sebagai berikut :

1. Model pengukuran untuk variabel eksogen
   $X_{1.1} = \lambda_1 \xi_1 + \delta_1$
   $X_{1.2} = \lambda_2 \xi_1 + \delta_2$
   $X_{1.3} = \lambda_3 \xi_1 + \delta_3$
   $X_{2.1} = \lambda_4 \xi_2 + \delta_4$
   $X_{2.2} = \lambda_5 \xi_2 + \delta_5$
   $X_{2.3} = \lambda_6 \xi_2 + \delta_6$
   $X_{2.4} = \lambda_6 \xi_7 + \delta_7$
2. Model pengukuran untuk variabel endogen
   $Y_{1=} \lambda_8 \eta + \varepsilon_1$
   $Y_{2=} \lambda_9 \eta + \varepsilon_2$
   $Y_{3=} \lambda_{10} \eta + \varepsilon_3$
   $Y_{4=} \lambda_{11} \eta + \varepsilon_4$
   $Y_{5=} \lambda_{12} \eta + \varepsilon_5$

5. Estimasi

Estimasi menurut Imam Ghozali (2006:85), pada tahapan ini adalah :

> "Nilai γ, s dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program Smart PLS. Dasar yang digunakan untuk dalam etimasi adalah *resampling* dengan

Bootestrapping yang dikembangkan oleh Geisser & Stone. Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahap ketiga menghasilkan estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta)".

6. Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Uji kecocokan model pada *structural equation modeling* melalui pendekatan *partial least square* terdiri dari tiga jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model struktural dan uji kecocokan seluruh model/model gabungan.

a. Outer Model

Uji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan (*discriminant validity*).

1) Validitas konvergen (*convergent validity*) adalah nilai faktor *loading* pada laten dengan indikator-indikatornya. Faktor *loading* adalah koefisien jalur yang menghubungkan antara variabel laten dengan indikatornya. Validitas konvergen (*convergent validity*) dievaluasi dalam tiga tahap, yaitu:
   a) Indikator validitas: dilihat dari nilai faktor *loading* dan t-*statistic*. Nilai faktor *loading* lebih besar dari 0,10 dan nilai t-*statistic* lebih besar dari 1,645 menunjukkan bahwa indikator tersebut sahih (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013).
   b) Reliabilitas konstruk: dilihat dari nilai output *Composite Reliability* (CR). Kriteria dikatakan reliabel adalah nilai CR lebih besar dari 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013).
   c) Nilai *Average Variance Extracted* (AVE): nilai AVE yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,5 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013).

   Validitas konvergen (*convergent validity*) dinilai berdasarkan korelasi antara *item score*/*component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran yang digunakan adalah jika korelasi antara *item score*/*component score* dengan *construct score* angkanya lebih dari 0,7 maka dikatakan tinggi dan jika angkanya antara 0,5 - 0,6 maka dikatakan cukup (Imam Ghozali, 2006).
2) Validitas diskriminan (*discriminant validity*) dilakukan dalam dua tahap, yaitu dengan cara melihat nilai *cross loading factor* dan membandingkan akar AVE dengan korelasi antar konstruk/variabel laten. *Cross loading factor* untuk mengetahui apakah variabel laten memiliki diskriminan yang memadai yaitu dengan cara membandingkan korelasi indikator dengan variabel latennya harus lebih besar dibandingkan korelasi antara indikator dengan variabel laten yang lain. Jika korelasi indikator dengan variabel latennya memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap variabel laten lain, maka dikatakan variabel laten tersebut memiliki validitias diskriminan yang tinggi (Uce Indahyanti, 2013).

b. Inner model

Uji kecocokan model struktural (*fit test of structural model*) adalah uji kecocokan pada *inner model* berkaitan dengan pengujian hubungan antar variabel yang sebelumnya dihipotesiskan (Uce Indahyanti, 2013). Evaluasi menghasilkan hasil yang baik apabila:

a. Koefisien hubungan antar variabel tersebut signifikan secara statistik yaitu dengan nilai t-*statistic* ≥ 1,645. Taraf nyata atau taraf keberartian (α) dalam penelitian ini adalah 0,10, dimana di dalam tabel distribusi normal nilainya adalah 1,645. Apabila nilai t-*statistic* ≥ 1,645 berarti ada suatu hubungan ata pengaruh antar variabel dan menunjukkan bahwa model yang dihasilkan semakin baik (Uce Indahyanti, 2013).
b. Nilai koefisien determinasi (R^2 atau R-*square*) mendekati nilai 1. Nilai R^2 untuk konstruk dependen menunjukkan besarnya pengaruh/ketepatan konstruk independen dalam mempengaruhi konstruk dependen. Nilai R^2 menjelaskan seberapa besar variabel eksogen yang dihipotesiskan dalam persamaan mampu menerangkan variabel endogen. Chin (1998) dalam Uce Indahyanti (2013) menjelaskan kriteria batasan nilai R^2 terbagi dalam tiga klasifikasi yaitu nilai R^2 = 0,67; 0,33; dan 0,19 sebagai substansial, moderat, dan lemah. Semakin besar nilai R^2, berarti semakin baik model yang dihasilkan (Uce Indahyanti, 2013).

Ketentuan untuk melihat keeratan korelasi digunakan acuan pada tabel 3.2.

c. Uji kecocokan seluruh model/model gabungan

Uji kecocokan seluruh model/model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural, yang diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality* dikalikan dengan akar nilai rata-rata R-*square* (Vinzi, dkk, 2010 dalam Uce Indahyanti, 2013). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF

moderat); dan 0,36 (GoF substansial) (Uce Indahyanti, 2013).

3.5.2 Pengujian Hipotesis

Suatu uji hipotesis biasanya melibatkan tahapan-tahapan berikut :

1. Menetapkan hipotesis yang akan diuji

Penetapan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya hubungan antara variabel X dan variabel Y, yaitu hipotesis 0 (H_0) dan hipotesis alternatif (H_1). Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_1 : Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

H_2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Pengujian terhadap hipotesis dalam penelitian ini selanjutnya diuraikan sebagai berikut:

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap Kepatuhan wajib pajak. Persamaan model struktural :

$$\eta_1 = \beta\zeta_1 + \zeta_1$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dan 4 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 5 indikator. Model struktural yang diuji digambarkan sebagai berikut:

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : γ = 0 : Pengaruh ζ1 terhadap η tidak signifikan

H_1 : γ ≠ 0 : Pengaruh ζ_1 terhadap η signifikan

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak. Persamaan model struktural :

$$\eta = \gamma\ \eta_2 + \zeta_2$$

Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 3 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 5 indikator. Model struktural yang akan diuji digambarkan sebagai berikut:

Untuk menguji hipotesis penelitian secara parsial dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut :

H_0 : β = 0 : Pengaruh ζ_2 terhadap η tidak signifikan

H_2 : β ≠ 0 : Pengaruh ζ_2 terhadap η signifikan

2. Menentukan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan melakukan pengujian terhadap dua pihak. Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikan = 10% (1,645).

3. Uji Hipotesis

Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengukuran menggunakan rumus statistik uji t, yaitu sebagai berikut:

$$t = \frac{\beta}{SE(\beta)}$$

4. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis

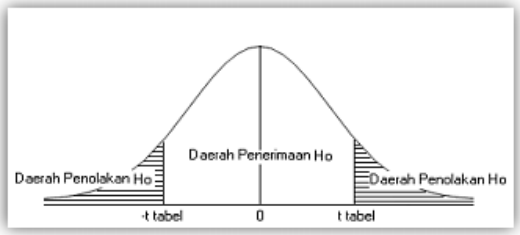
Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang dapat dilihat dibawah ini:

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_1 diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima H_1 ditolak

5. Menggambarkan daerah penerimaan hipotesis

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis.



Sumber : Sugiyono dalam Umi Narimawati (2010:54)

Gambar 3.1
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

6. Membuat kesimpulan

Membuat kesimpulan adalah langkah terakhir dari suatu periode penelitian yang berupa jawaban atas rumusan masalah.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Pengujian Alat Ukur

Sebelum data hasil penelitian diolah, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap alat ukur penelitian untuk membuktikan alat ukur (kuisioner) yang digunakan memiliki kesahihan (*validity*) dan keandalan (*reliability*). Hasil pengujian validitas dan reabilitas diuraikan sebagai berikut:

4.1.1.1 Hasil Pengujian Validitas

Variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) diukur dengan 12 item pertanyaan sebagai indikator. Hasil koefisien validitas untuk pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y).

Hasil uji validitas terhadap 12 item pernyataan variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) diperoleh semua item memiliki nilai $r_{hitung} > 0,30$, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item Variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) valid. Berdasarkan hasil yang diperoleh disimpulkan bahwa item kuesioner 1 sampai 12 telah memiliki persyaratan Validitas dan tepat untuk digunakan sebagai alat mengumpulkan data mengenai Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) dalam penelitian ini.

4.1.1.2 Hasil Pengujian Realiabilitas

Uji Reliabilitas digunakan untuk mengukur tingkat kekonsistenan tanggapan responden terhadap item pernyataan kuesioner berdasarkan pemahaman responden terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner yang diajukan. Uji Reliabilitas dilakukan dengan metode Split half.

Hasil perhitungan koefisien reliabilitas untuk setiap variabel dapat dilhat pada tabel 4.2. Nilai Koefisien Reliabilitas untuk mesing-masing variabel seperti terlihat pada tabel di atas lebih besar dari 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa alat ukur yang digunakan reliabel dan jawaban-jawaban yang telah diberikan oleh responden berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebagai acuan studi ini, dapat dipercaya (reliable) dan andal. Dan dapat digunakan untuk mengumpulkan data secara berulang-ulang dalam waktu berbeda dan responden yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa kuisioner ini dapat digunakan untuk mengumpulkan data kepada 100 responden dengan waktu yang berbeda (selama 2 minggu).

4.1.2 Analisis Deskriptif

Deskriptif hasil data penelitian memberikan gambaran penilaian responden untuk setiap objek penelitain yang dalam hal ini Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak. Untuk menginterpretasikan variabel yang diteliti dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.1.2.1 Analisis Deskriptif Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan dari kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern diukur dengan 4 indikator yaitu restruktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM dan pelaksanaan *good governance*.

Untuk menilai masing-masing indikator peneliti mengunakan nilai persentase skor ideal dengan skor total. Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk empat indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.3.

Pada Tabel 4.3 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas keempat indikator yang membentuk Penerapan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 1321 (66,1%) dan termasuk dalam kategori cukup, namun masih terdapat *gap* sebesar 39,9%. Artinya Penerapan sistem administrasi perpajakan modern oleh wajib pajak masih cukup tinggi dilakukan. Hal ini sama dengan fenomena yang menyebutkan bahwa penyebab utama ketidakpatuhannya wajib pajak dikarenakan banyaknya wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan.

4.1.2.2 Analisis Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menyatakan bahwa penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar. Variabel bebas Kesadaran wajib pajak terdiri dari tiga indikator yaitu mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari data penelitian diperoleh penilaian responden untuk tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kesadaran wajib pajak dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.4.

Pada Tabel 4.4 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas ketiga indikator yang membentuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 1011 67,4% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya wajib pajak di KPP Pratama Soreang sudah memiliki Kesadaran wajib pajak yang cukup baik. Namun masih ada *gap* sebesar 32.6%, yang artinya sebagian wajib pajak belum memiliki kesadaran yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini sama dengan fenomena yang menyebutkan bahwa kesadaran warga Indonesia untuk membayar pajak hingga saat ini masih rendah.

4.1.2.3 Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Variabel Kepatuhan wajib pajak terdiri dari lima indikator yaitu Mengisi Formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung perhitungan dengan benar, Membayar pajak tepat waktu, Tepat waktu dalam melaporkan SPT dan Tidak mempunyai tunggakan.

Dari data penelitian diperoleh penilaian resonden untuk lima indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini seperti terlihat pada tabel 4.5.

Pada Tabel 4.5 dapat dilihat persentase total skor tanggapan responden atas lima indikator yang membentuk Kepatuhan wajib pajak sebesar 67,6% dan termasuk dalam kategori cukup baik. Artinya Wajib pajak di KPP Pratama Soreang sudah cukup baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Namun masih ada *gap* sebesar 32.4% yang artinya wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar dan melaporkan pajak. Hal ini sama dengan fenomena yang menyebutkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh melaporkan SPT.

4.1.3 Analisis Verifikatif

4.1.3.1 Hasil Model Pengaruh

Selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menguji pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak maka penulis akan melakukan serangkaian analisis kuantitatif yang relevan dengan tujuan penelitian. Karena data skor jawaban responden masih berbentuk skala ordinal maka agar data tersebut dapat diolah menggunakan *structural equation modeling* terlebih dahulu data ordinal dikonversi menjadi skala interval melalui *method of succesive interval* yang selanjutnya diolah menggunakan *structural equation modeling* dengan metode alternatif *partial least square* menggunakan software SmartPLS 2.0.

Dalam *structural equation modeling* ada dua jenis model yang terbentuk, yaitu model pengukuran dan model struktural. Model pengukuran menjelaskan proporsi variance masing-masing variabel manifes (indikator) yang dapat dijelaskan di dalam variabel laten. Melalui model pengukuran akan diketahui indikator mana yang lebih dominan dalam pembentukkan variabel laten. Setelah model pengukuran masing-masing variabel laten diuraikan selanjutnya akan dijabarkan model struktural yang akan mengkaji pengaruh masing-masing variabel laten independen (*exogenous latent variable*) terhadap variabel laten dependen (*endogenous latent variable*).

Pada penelitian ini terdapat 3 variabel laten dengan 12 variabel *manifest*. Variabel Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terdiri dari 4 variabel *manifest*, variabel Kesadaran Wajib Pajak dari 3 variabel *manifest*, dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari 5 variabel *manifest*. Hasil perhitungan dari keseluruhan model menggunakan *SmartPLS 2.0* dapat dilihat pada gambar 4.1.

Pengujian hasil *Struktural EquationModelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* dilakukan dengan melihat hasil model pengukuran (*Outer model*) dan hasil model struktural (*inner model*) dari model yang diteliti.

4.1.3.2 Pengujian Model Pengaruh

Variabel Penerapan system administrasi perpajakan modern, Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak memiliki 12 variabel manifes yang membentuknya yaitu Restruktur organisasi, Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, Penyempurnaan manajemen SDM, Pelaksanaan *good governance,* Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Mengisi Formulir pajak dengan lengkap dan jelas, Menghitung perhitungan dengan benar, Membayar pajak tepat waktu, Tepat waktu dalam melaporkan SPT dan Tidak mempunyai tunggakan.

Hasil perhitungan bobot faktor untuk setiap variabel manifest dalam membentuk variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dapat dilihat pada tabel 4.6.

Nilai Loding faktor untuk masing-masing variabel manifes Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1), Kesadaran wajib pajak (X_2) dan Kepatuhan wajib pajak (Y) berkisar antara 0,7 – 0,9. Bobot variabel manifes (indikator) yang diperoleh sudah di atas rata-rata untuk loding faktor sebesar 0,5 yang disyaratakan sehingga dapat dinyatakan bahwa 12 variabel manifes dapat dikatakan tepat dalam mengukur varaibel yang digunakan.

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern (X_1) diperoleh nilai loding faktor untuk Restruktur organisasi ($X_{1,1}$) sebesar 0,849 dengan t_{hitung} sebesar 24,048, nilai loading faktor untuk Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi ($X_{1,2}$) sebesar 0,896 dengan t_{hitung} sebesar 56,022, nilai loading faktor untuk Penyempurnaan manajemen SDM ($X_{1,3}$) sebesar 0,848 dengan t_{hitung} sebesar 35,836 dan nilai loading faktor untuk Pelaksanaan *good govarnance* ($X_{1,4}$)

sebesar 0,788 dengan t_{hitung} sebesar 16,004. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1).

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Kesadaran Wajib Pajak (X_2) diperoleh nilai loading faktor untuk Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan ($X_{2,1}$) sebesar 0,811 dengan t_{hitung} sebesar 22,942, nilai loading faktor untuk Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara ($X_{2,2}$) sebesar 0,795 dengan t_{hitung} sebesar 11,759, dan nilai loading faktor untuk Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ($X_{2,3}$) sebesar 0,865 dengan t_{hitung} sebesar 44,894. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Kesadaran Wajib Pajak (X_2) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_2).

Untuk masing masing variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) diperoleh nilai loading faktor untuk Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas (Y_1) sebesar 0,823 dengan t_{hitung} sebesar 25,667, nilai loading faktor untuk Menghitung perhitungan dengan benar (Y_2) sebesar 0,791 dengan t_{hitung} sebesar 26,128, nilai loading faktor untuk Membayar pajak tepat waktu (Y_3) 0,769 dengan t_{hitung} sebesar 17,429, nilai loding faktor untuk Tepat waktu dalam melaporkan SPT (Y_4) sebesar 0,780 dengan t_{hitung} sebesar 20,350 dan nilai loading faktor untuk Tidak mempunyai tunggakan (Y_5) sebesar 0,650 dengan t_{hitung} sebesar 9,989. Nilai t_{hitung} yang diperoleh untuk setiap variabel manifes dari variabel laten Kepatuhan Wajib Pajak (Y) lebih dari 1,645 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel manifes yang digunakan bermakna dalam mengukur variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan loding faktor dan *t*-statistik tersebut diketahui bahwa terdapat 12 indikator Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak yang mempunyai hubungan positif dan signifikan dalam menentukan Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak.

4.1.3.1 Pengujian Model Struktural

Ukuran yang digunakan dalam menguji model struktural yang diperoleh dalam *Struktural Equation Modelling* (*SEM*) dengan pendekatan *Partial Least Square (PLS)* adalah *convergent validity, discriminan validity, composite reliability*. Hasil penilaian ukuran model struktural Penerapan sistem administrasi perpajakan modern, Kesadaran wajib pajak dan Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. *Convergent validity*

Convergent validity menilai ketepatan konstruk variabel laten dibentuk oleh indikatornya. *Convergent validity* dinilai berdasarkan korelasi antara item *score/component score* dengan *construct score* yang diperoleh. Hasil perhitungan Nilai *Convergent validity* untuk ketiga variabel laten dalam model penelitian terlihat pada tabel 4.7.

Nilai *Convergent validity* hasil korelasi konstruk Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dengan indikatornya ($X_{1,1}$, $X_{1,2}$, $X_{1,3}$, $X_{1,4}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1) tepat dibentuk oleh indikatornya, yaitu restrutur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM dan pelaksanaan *good governance*.

Hasil perhitungan pada tabel terlihat korelasi konstruk Kesadaran wajib pajak dengan indikatornya ($X_{2,1}$ $X_{2,2}$ $X_{2,3}$) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kesadaran wajib pajak (X_2) tepat dibentuk oleh indikatornya, yaitu mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku..

Hasil korelasi konstruk Kepatuhan wajib pajak (Y) dengan indikatornya (Y_1,Y_2,Y_3,Y_4,Y_5) lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan indikator lain. Hal ini menunjukkan bahwa konstruk laten Kepatuhan wajib pajak tepat dibentuk oleh indikatornya yaitu mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung perhitungan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, tepat waktu dalam melaporkan SPT dan tidak mempunyai tunggakan.

2. *Discriminan validity*

Peniliaan kedua yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Discriminan validity*. *Discriminan validity* melihat bagaimana validitas dari konstruk yang terbentuk dibandingakan dengan konstruk yang lainnya. Untuk konstruk yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan, diperoleh *Discriminan validity* berdasarkan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dapat dilihat pada tabel 4.8.

Hasil yang diperoleh untuk nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk X_1

(Penerapan sistem administrasi perpajakan modern) sebesar 0,7159, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk X_2 (Kesadaran wajib pajak) sebesar 0,6792 dan Nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk konstruk Y (Kepatuhan wajib pajak) sebesar 0,5847. Dapat dilihat pada tabel 4.9.

Dari nilai akar kuadrat AVE untuk masing masing variabel terlihat bahwa nilai akar kuadrat AVE lebih besar dibandingkan dengan korelasi masing-masing variabel dengan variabel laten lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel laten (konstruk) yang terbentuk memiliki validitas yang baik, yang dibentuk oleh indikatornya dibandingakan dengan variabael laten yang lainnya. Artinya bahwa indikator yang digunakan peneliti telah tepat menjelaskan variabelnya. Indikator dari penerapan sistem administrasi perpajakan modern (restruktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM dan pelaksanaan *good governance*), kesadaran wajib pajak (mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku), dan kepatuhan wajib pajak (mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung perhitungan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, tepat waktu dalam melaporkan SPT dan tidak mempunyai tunggakan).

3. *Composite reliability*

Peniliaan ketiga yang dilakukan untuk melihat model struktural yang diperoleh menggunakan nilai *Composite Reliability.* Nilai ini menunjukkan keandalan variabel laten (konstruk) yang terbentuk dari variabel manifesnya sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Untuk ketiga variabel laten yang digunakan sebagai variabel yang dihipotesiskan diperoleh Nilai *Composite Reliability* dapat dilihat pada tabel 4.10.

Variabel laten Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1) dibentuk oleh 4 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R)sebesar 0,9096. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1) memiliki konsisten yang tinggi, dengan dibentuk oleh 3 variabel manifes (restruktur organisasi, penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi, penyempurnaan manajemen SDM dan pelaksanaan *good governance*) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Kesadaran wajib pajak (X_2) dibentuk oleh 3 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten Kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,8638. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Kesadaran wajib pajak (X_2) memiliki konsisten yang tinggi, dengan dibentuk oleh 3 variabel manifes (mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara dan memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

Variabel laten Kepatuhan wajib pajak (Y) yang dibentuk oleh 5 variabel manifes. Hasil pada tabel di atas terlihat variabel laten Kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai *Composite Reliability* (C-R) sebesar 0,8750. Nilai C-R yang diperoleh sudah lebih besar dari nilai ideal yang direkomendasikan untuk suatu konstruk dinyatakan baik yaitu 0,7. Hal ini berarti variabel laten Kepatuhan wajib pajakmemiliki konsisten yang tinggi dibentuk oleh 5 variabel manifes (mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung perhitungan dengan benar, membayar pajak tepat waktu, tepat waktu dalam melaporkan SPT dan tidak mempunyai tunggakan) sehingga terbentuk model struktural yang sesuai.

4. Nilai Koefisien Korelasi

Nilai koefisien korelasi menunjukkan pengaruh (korelasi) antar dua buah variabel. Hasil nilai koefisien korelasi dari model structural dapat dilihat pada tabel 4.11

Hasil uji dari nilai koefisien korelasi dari adalah sebagai berikut:

a. Nilai koefisien korelasi penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,576 dan termasuk ke dalam kriteria hubungan yang kuat (erat). Dimana jika penerapan sistem administrasi perpajakan modern baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika penerapan sistem administrasi perpajakan modern menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.
b. Nilai koefisien korelasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajaksebesar 0,312 dan termasuk ke dalam kriteria hubungan yang rendah (lemah). Dimana jika kesadaran wajib pajak baik, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sebaliknya, jika kesadaran wajib pajak menurun, maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan atau tidak pada model yang dibentuk, selain itu model yang dibentuk memiliki model yang baik atau tidak. Nilai t_{hitung} digunakan untuk pengujian hipotesis untuk membuktikan ada atau tidaknya hubungan antar variabel. Nilai t_{hitung} harus lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,645.

Nilai koefisien determinasi (R-*square*/R^2) menunjukkan besarnya ketepatan pengaruh antar variabel laten. Nilai koefisien determinasi (R^2) penerapan sistem administrasi perpajakan modern, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,6500 dan termasuk ke dalam kriteria pengaruh kuat (erat). Artinya penerapan sistem administrasi perpajakan modern cukup tepat mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 65,0% dan memiliki *gap* sebesar 35,0% yang merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Begitu juga dengan kesadaran wajib pajak cukup mempengaruhi terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 65,0% dan memiliki *gap* sebesar 35,0% yang merupakan pengaruh faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

4.1.3.4 Pengujian Hipotesis

Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini. Kedua hipotesis ini diuji dengan statistik uji t dengan ketentuan H_0 ditolak jika t_{hitung} lebih besar dari nilai kritis untuk α = 0,10 sebesar 1,645. Suatu uji hipotesis biasanya melibatkan tahapan-tahapan berikut:

1. Menetapkan hipotesis yang telah diuji

Hipotesis I

Hipotesis pertama adalah Penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Model pengukuran dan struktural terdiri dari 1 *exogenous constructs* dengan 4 indikator dan 1 *endogenous constructs* dengan 5 indikator

Hipotesis II

Hipotesis kedua adalah Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Model pengukuran dan struktural tersiri dari 1 *exogenous contruct* dengan 3 indikator dan 1 *endogenous construct* dengan 5 indikator.

2. Menentukan tingkat signifikansi

Berikut ini disajikan hasil uji signifikansi dari hipotesis tersebut berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SmartPLS 2.0 dapat dilihat pada tabel 4.12 dan tabel 4.13 .

3. Uji hipotesis

Hasil nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel Penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 7,217. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh (7,217) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

Nilai $t\text{-}_{hitung}$ koefisien jalur dari variabel Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh sebesar 3,301. Nilai $t\text{-}_{hitung}$ yang diperoleh (3,301) lebih besar dari $t\text{-}_{kritis}$ (1,645) sehingga keputusan uji hipotesis menolak Ho. Jadi dapat disimpulkan bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak.

4. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis

Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang dapat dilihat dibawah ini :

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka H_0 ditolak H_1 diterima

Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima H_1 ditolak

5. Menggambar daerah penerimaan hipotesis

Untuk menggambarkan daerah penerimaan dan penolakan terhadap sebuah hipotesis dapat digambarkan dengan uji dua pihak daerah penerimaan dan penolakan hipotesis. Gambar daerah penerimaan berdasarkan hipotesis dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2.

6. **Membuat kesimpulan**

Berdasarkan hipotesis yang telah dijelaskan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Penerapan sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.
2) Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Soreang.

4.1.4.1 Besar Pengaruh

Besar pengaruh Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak diperoleh pada tabel 4.14.

Ho.$\gamma_1 = 0$	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak
Ha.$\gamma_1 \neq 0$	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak
Ho.$\gamma_2 = 0$	Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak
Ha.$\gamma_2 \neq 0$	Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hasil pengaruh Penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan Kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa

pengaruh Penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap Kepatuhan wajib pajak lebih besar dibandingkan pengaruh Kesadaran wajib pajak.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan fenomena, kerangka pemikiran, operasional variabel dan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem administrasi perpajakan modern dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penyebab utama ketidakpatuhannya wajib pajak dikarenakan banyaknya wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam memahami administrasi perpajakan yang ditandai dengan:
   a. Restruktur organisasi yang dilakukan dengan memberikan pelayanan kepada wajib pajak masih dirasa kurang baik oleh wajib pajak.
   b. Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang dilakukan oleh KPP masih kurang.
   c. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia yang dilakukan dengan memberikan perbaikan sistem administrasi masih belum dapat membantu wajib pajak sepenuhnya.
   d. Pelaksanaan *good governance* yang dilakukan dengan mengadakan pengawasan terhadap wajib pajak belum maksimal dalam pelaksanaanya sehingga masih ada wajib pajak yang menghindar untuk tidak membayar pajak.
2. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak rendah terjadi karena kesadaran wajib pajak saat ini masih rendah yang ditandai dengan:
   a. Masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
   b. Masih banyak wajib pajak yang kurang mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
   c. Masih banyak wajib pajak yang kurang memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini bisa membantu pihak yang terkait dalam mengevaluasi dan bisa menjadi bahan pertimbangan dari:

1. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, maka KPP perlu memberi perhatian fokus pada penerapan sistem administrasi perpajakan modern saat ini. Perhatian itu dilakukan dengan:
   a. Memberikan kualitas pelayanan yang baik terhadap wajib pajak.
   b. Memberikan fasilitas teknologi yang sederhana untuk memudahkan wajib pajak dalam menggunakan fasilitas teknologi tersebut.
   c. Memberikan sistem administrasi yang sederhana yang mudah dijalankan oleh para wajib pajak.
   d. Melakukan pengawasan dengan baik sehingga wajib pajak tidak dapat menghindar untuk tidak membayar pajak.
2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka KPP perlu memberi perhatian fokus terhadap tingkat kesadaran wajib pajak. Perhatian itu dilakukan dengan:
   a. Memberikan pengetahuan kepada wajib pajak tentang undang-undang dan ketentuan perpajakan.
   b. Memberikan pengetahuan kepada wajib pajak dari fungsi pajak tersebut.
   c. Meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Mas Andriani Pratiwi & Putu Ery Setiawan, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisis Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak,* ISSN:2302-8556, 2014

Arikunto S, 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.

Boediono. 2007. Pelayanan Prima Perpajakan. Rineka Cipta. Jakarta

Chaizi Nasucha. 2004. Reformasi Administrasi Publik. Jakarta. Salemba Empat

Ghozali, Imam, 2005. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Doponegoro, Semarang.

Gunadi. *2005*. Akuntansi Pajak. Penerbit Grasindo. Jakarta

Hasan Irawan & Siti Khairani, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Palembang*, 2012

Husein Umar. 2008. Metode Penelitian. Jakarta. Raja Grafindp Persada

Irianto, S. E. 2005. Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta. UII Press

Ketut Evi Susilawati & Ketut Budiartha, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak*, ISSN: 2302-8556, 2013

Lena Ellitan dan Lina Anatan. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam bisnis Modern. Alfabeta. Bandung

Liberti Pandiangan. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru. Jakarta: PT Elek Media Komputindo

Mashuri dan M. Zainudin. 2009. Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif. Refika Aditama. Bandung

Manik Asri, Wuri. 2009. *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Madya Denpasar*. Skripsi Jurusan Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

Ni Ketut Muliari & Putu Ery Setiawan. 2010. *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur.* Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis Vol. 6, No. 1 Januari 2011.

Rapina, Jerry & Yenni Carolina, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*, Vol III No.2, Oktober 2011

Sinta Setiana, Tan Kwang En & Lidya Agustina, *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,* Vol. II No.2, November 2010

Siti Kurnia Rahayu. 2010. Perpajakan Indonesia. Graha Ilmu. Yogyakarta

Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu Satu. Jakarta

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D. Alphabet. Bandung

Sugiyono. 2011. Statistik Untuk Penelitian. Alphabet. Bandung

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No.SE-45/PJ/2007

Suyatmin. 2004. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran PBB Studi Empiris di wilayah KPPBB Surakarta*

Tryana A M Tiraada, *Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*, ISSN: 2303-1174, September 2013

Umi Narimawati. 2010. Penulisan Karya Ilmiah. Genesis. Jakarta

www.okezone.com

www.republika.com

LAMPIRAN TABEL

Tabel 3.1 Lambang Statistik

Lambang	Indikator	Lambang	Indikator
$X_{1,1}$	Restruktur organisasi	ξ_1	Sistem Administrasi Perpajakan Modern
$X_{.1,2}$	Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi dan informasi		
$X_{1,3}$	Penyempurnan manajemen sumber daya manusia		
$X_{1,4}$	Pelaksanaan *good governance*		
$X_{2,1}$	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	ξ_2	Kesadaran Wajib Pajak
$X_{2,2}$	Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara		
X2,3	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
Y_1	Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas	η	Kepatuhan Wajib Pajak
Y_2	Menghitung perhitungan dengan benar		
Y_3	Membayar pajak tepat waktu		
Y_4	Tepat waktu dalam melaporkan SPT		
Y_5	Tidak mempunyai tunggakan		

Tabel 3.2 Tingkat Keeratan Korelasi

No	Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
1	0,000-0,199	Sangat rendah/Sangat Lemah
2	0,200-0,399	Rendah/Lemah
3	0,400-0,599	Sedang/moderat
4	0,600-0,799	Kuat/Erat
5	0,800-1,000	Sangat Kuat/Sangat Erat

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Koefisien Validitas

No. Butir	r	r_{tabel}	Keterangan
1	0.852	0,3	Valid
2	0.889	0,3	Valid
3	0.839	0,3	Valid
4	0.802	0,3	Valid
5	0.835	0,3	Valid
6	0.821	0,3	Valid
7	0.824	0,3	Valid
8	0.818	0,3	Valid
9	0.770	0,3	Valid
10	0.786	0,3	Valid
11	0.769	0,3	Valid
12	0.676	0,3	Valid

Tabel 4.2 Hasil Perhitungan Koefisien

No	Variabel	Koefisien Reliabilitas	Keterangan
1	Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1)	0,858	Reliabel
2	Kesadaran wajib pajak (X_2)	0,750	Reliabel
5	Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,832	Reliabel

Tabel 4.3 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Restruktur organisasi.	330	500	66,0%	Cukup
2	Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi.	332	500	66,4%	Cukup
3	Penyempurnaan manajemen SDM	330	500	66,0%	Cukup
4	Pelaksanaan *good govarnance*	329	500	65,8%	Cukup
Total		**1321**	**2000**	**66,1%**	**Cukup**

Tabel 4.4 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kesadaran Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan	346	500	69,2%	Baik
2	Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara	341	500	68,2%	Baik
3	Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	324	500	64,8%	Cukup
Total		**1011**	**1500**	**67,4%**	**Cukup**

Tabel 4.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Kepatuhan Wajib Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Mengisi Formulir pajak dengan lengkap dan jelas	361	500	72,2%	Baik
2	Menghitung perhitungan dengan benar	341	500	68,2%	Baik
3	Membayar pajak tepat waktu	283	500	56,6%	Cukup
4	Tepat waktu dalam melaporkan SPT	306	500	61,2%	Cukup
5	Tidak mempunyai tunggakan	400	500	80,0%	Baik
Total		**1691**	**2500**	**67,6%**	**Cukup**

Tabel 4.6 Model Pengukuran Variabel

Variabel Manifes	Loding Faktor	*Measurement Model*	t_{hitung}
Restruktur organisasi($X_{1,1}$)	0,849	X_{11}= 0,849 X_1+ 0,279	24,048
Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi($X_{1,2}$)	0,896	X_{12}= 0,896 X_1+ 0,198	56,022

Penyempurnaan manajemen SDM($X_{1,3}$)	0,848	X_{13}= 0,848 X_1+ 0,281	35,836
Pelaksanaan *good 19overnance* ($X_{1,4}$)	0,788	X_{14}= 0,788 X_1+ 0,379	16,004
Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan (X2,1)	0,811	X21= 0,811 X2+ 0,342	22,942
Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara (X2,2)	0,795	X22= 0,795 X2+ 0,368	11,759
Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (X2,3)	0,865	X23= 0,865 X2+ 0,252	44,894
Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas (Y1)	0,823	Y1= 0,823 Y+ 0,323	25,667
Menghitung perhitungan dengan benar(Y2)	0,791	Y2= 0,791 Y+ 0,375	26,128
Membayar pajak tepat waktu(Y3)	0,769	Y1= 0,769 Y+ 0,409	17,429
Tepat waktu dalam melaporkan SPT(Y4)	0,780	Y1= 0,780Y+ 0,392	20,350
Tidak mempunyai tunggakan(Y5)	0,650	Y1= 0,650 Y+ 0,577	9,989

Tabel 4.7 Nilai *Convergent validity*

	X1 (Penerapan sistem administrasi perpajakan modern)	**X2 (Kesadaran wajib pajak)**	**Y (Kepatuhan wajib pajak)**
X1.1	0,8493	0,5121	0,6372
X1.2	0,8956	0,5663	0,6961
X1.3	0,8478	0,5571	0,6761
X1.4	0,7881	0,4300	0,5819
X2.1	0,4685	0,8110	0,4786
X2.2	0,4754	0,7951	0,4629
X2.3	0,5600	0,8647	0,6655
Y.1	0,6105	0,4687	0,8228
Y.2	0,6510	0,6138	0,7908
Y.3	0,4918	0,4249	0,7686
Y.4	0,6448	0,5575	0,7797
Y.5	0,5021	0,4433	0,6500

Tabel 4.8 Perbandingan Nilai AVE Dengan Korelasi antar Variabel Laten

	Discriminan validity		**Nilai Korelasi**		
	AVE	**Akar Kuadrat AVE**	**X1 (Penerapan 19ystem administrasi perpajakan modern)**	**X2 (Kesadaran wajib pajak)**	**Y (Kepatuhan wajib pajak)**
Penerapan 19ystem administrasiperpajakan	0,7159	0,8461	1,0000	0,6134	0,7677

modern (X_1)					
Kesadaran wajib pajak (X_2)	0,6792	0,8242	0,6134	1,0000	0,6654
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,5847	0,7647	0,7677	0,6654	1,0000

Tabel 4.9 Nilai *Composite Reliability* Variabel Laten

Variabel	*Composite Reliability*
Penerapan sistem administrasi perpajakan modern (X_1)	0,9096
Kesadaran wajib pajak (X_2)	0,8638
Kepatuhan perpajakan (Y)	0,8750

Tabel 4.10 Nilai Koefisien Korelasi

Jalur	Koefisien Korelasi	t_{hitung}*	R-Square
Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern ➔ Kepatuhan Wajib Pajak	0,576	7,217	0,6500
Kesadaran Wajib Pajak ➔ Kepatuhan Wajib Pajak	0,312	3,301	0,6500

Tabel 4.11 Uji Signifikansi Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Koefesien Jalur	t_{hitung}	t-kritis	Kesimpulan
0,576	7,217	1,645	Signifikan

Tabel 4.12 Uji Signifikansi Pengaruh Kesadaran wajib pajakterhadap Kepatuhan wajib pajak

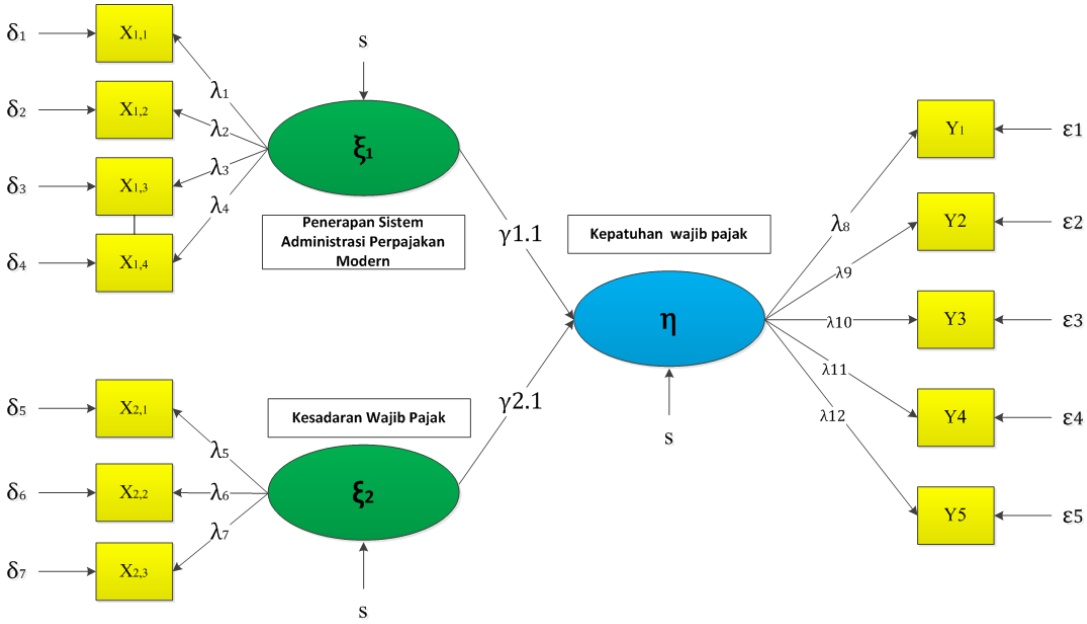
Koefesien Jalur	t_{hitung}	t-kritis	Kesimpulan
0,312	3,301	1,645	Signifikan

Tabel 4.13 Besar Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

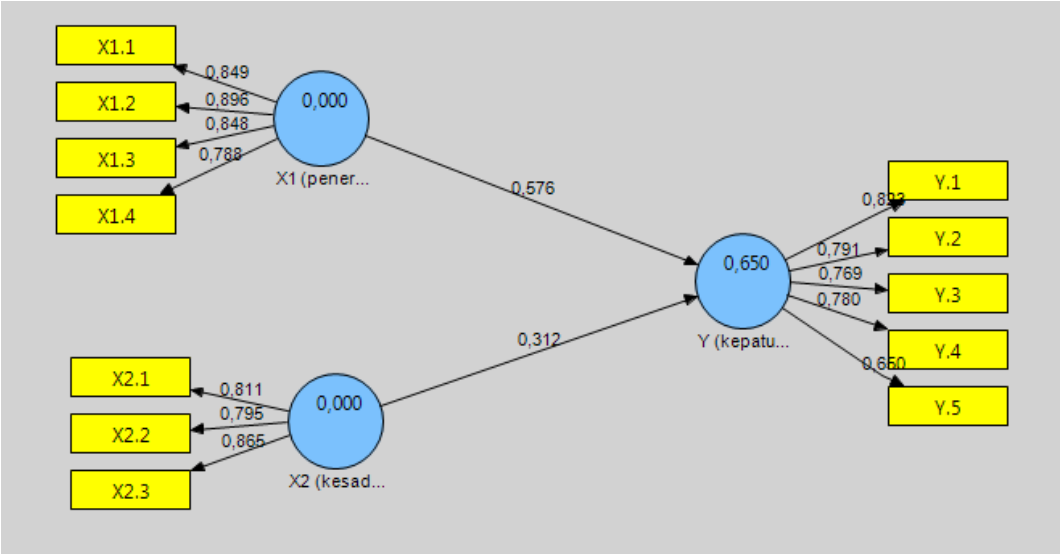
Variabel	Koefisien Jalur	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung		Total
			X_1	X_2	
Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern	0,576	33,22%		11,03%	44,25%
Kesadaran Wajib Pajak	0,312	9,72%	11,03%		20,75%
Total Pengaruh					**65,00%**

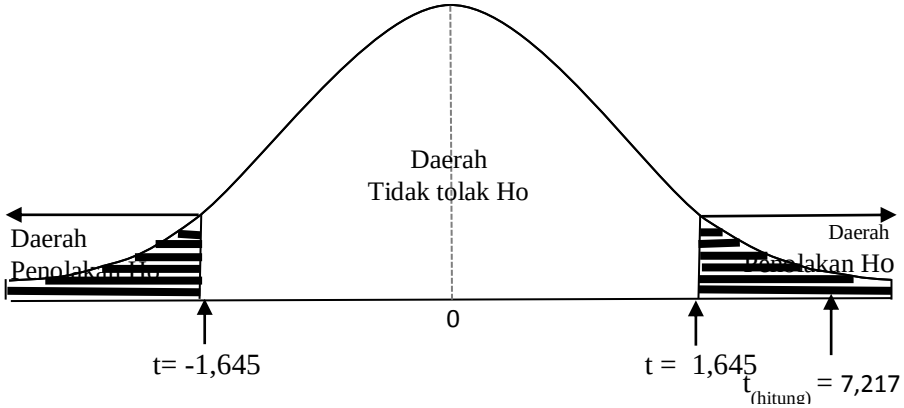
LAMPIRAN GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Analisis Variabel Penelitian Secara Keseluruhan

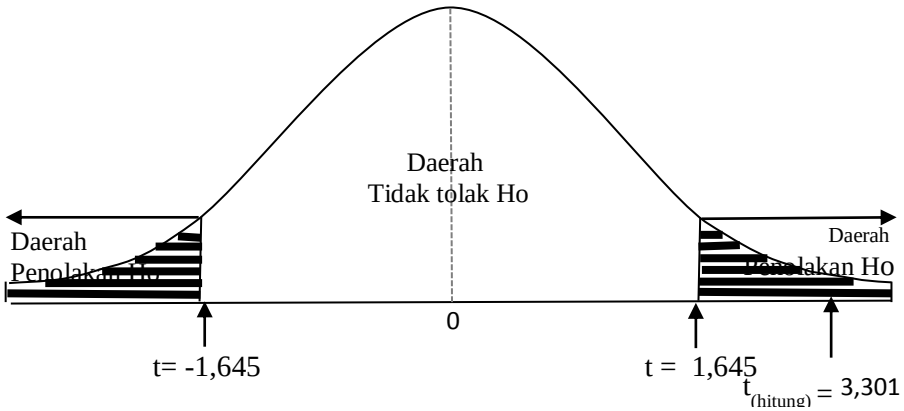


Gambar 4.1 Diagram Jalur Model Keseluruhan





Gambar 4.3
Daerah Penerimaan Hipotesis I



Gambar 4.4
Daerah Penerimaan Hipotesis II